



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 16 November 2016

Halaman: 2

► LINGKUNGAN HIDUP

Penanganan Kawasan Kumuh Pukau Menteri

JOGJA—Keberhasilan Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegaltrejo, Kota Jogja, mengentaskan kawasan kumuh memukau sejumlah menteri Kabinet Kerja II. Para menteri kagum dengan perubahan wajah permukiman di Karangwaru.

Selasa (15/11), empat menteri berdialog dengan warga di Karangwaru. Keempatnya adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek. Mereka menyisir permukiman yang berada di bantaran Sungai Buntung. "Saya tidak menyangka Karangwaru bisa sampai seperti ini, meski baru lima tahun. Tempat ini harus dijadikan



Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (*kiri*) dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek (*dua kiri*) meninjau program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di bantaran Sungai Karangwaru, Jogja, Selasa (15/11).

contoh untuk wilayah lain yang belum bebas dari kumuh," ujar Puan Maharani. Karangwaru merupakan satu dari 11.067 kelurahan maupun

desa di Indonesia yang menjadi lokasi program Kota tanpa Kumuh (Kotaku). Kotaku merupakan program kerja sama Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat dengan Kementerian Desa.

Kotaku merupakan program peningkatan kualitas hidup di kawasan kumuh. Melalui program ini, pemerintah ingin menghilangkan kawasan kumuh pada 2019.

Kementerian PUPR akan menggelontorkan dana sekitar Rp10 triliun untuk penanganan kawasan kumuh di 269 kota maupun kabupaten di Indonesia. "Dana yang akan digunakan oleh setiap kabupaten maupun kota tidak sama, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan atau usulan berdasarkan perencanaan yang disusun," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan Kotaku tidak sekadar menggerakkan masyarakat untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. (*Holy Kartika N.S*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 29 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005